

## ABSTRAK

Pelaksanaan Reklamasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sehingga menghasilkan suatu daratan baru berupa tanah hasil reklamasi menimbulkan fenomena di masyarakat tentang yang berhak memiliki hak atas tanah diatas tanah hasil reklamasi tersebut. Untuk menjawab fenomena tersebut, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan judul “Asas Persamaan Hak dalam Pengajuan Permohonan Hak Atas Tanah Reklamasi” dengan dua pokok permasalahan yakni; eksistensi asas persamaan hak dalam pengajuan permohonan hak atas tanah reklamasi, dan kewenangan badan pertanahan nasional atas pemberian prioritas dalam pengajuan permohonan hak atas tanah reklamasi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang menjadikan konsep atau asas hukum sebagai objeknya yang dikaitkan dengan norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sumber datanya berupa bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dan meunjang bahan hukum primer. Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, antara lain; Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Study kasus.

Tesis ini bertujuan untuk menjawab fenomena di masyarakat mengenai perolehan hak atas tanah reklamasi. Dalam tesis ini ditemukan bahwa tanah hasil reklamasi merupakan tanah yang dikuasai oleh negara dan pelaksana reklamasi diberikan prioritas untuk mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah reklamasi dengan dasar pemikiran bahwa tanah reklamasi hanya akan timbul ketika terjadi pelaksanaan reklamasi, dan tanpa pelaksanaan reklamasi tidak akan timbul sebidang tanah yang dapat diajukan permohonan pemberian hak atas tanah diatasnya, dan Badan Pertanahan Nasional memiliki wewenang diskresi untuk menjawab fenomena di masyarakat.

**Kata Kunci** : Asas Persamaan Hak, Tanah Reklamasi, Diskresi

### ABSTRACT

The implementation of the reclamation that occurred in several regions in Indonesia so as to produce a new land in the form of reclaimed land caused a phenomenon in the community about who has the right to have land rights on the reclaimed land. To answer this phenomenon, the writer tries to do a research with the title "Equality Principle in Submitting an Application for Reclamation Land Rights" with two main problems namely; the principle of equal rights existence in submitting of an application for reclamation land rights, and the authority of the Badan Pertanahan Nasional for granting priority in submitting reclamation rights claims.

This research is a juridice-normative legal research wich use the principle and legal concept as an object and associated it with norms and legal norms in the applicable laws and regulations. So that the data source is in the form of legal materials which are divided into primary legal materials in the form of applicable laws and regulations and are related to the issues discussed, and secondary legal materials relating to and supporting primary legal materials. The problem approach in this study is divided into three, among others; Statute approach, Case approach, and Case study.

This thesis aims to address the phenomenon in society regarding the acquisition of reclamation land rights. In this thesis, it is found that the reclaimed land is land that is controlled by the state and the reclamation executor is given priority to submit a request for the grant of reclamation rights on the basis that the reclaimed land will only arise when reclamation takes place, and without the implementation of the reclamation there will not be a plot of land that can be submitted an application for granting land rights on it, and Badan Pertanahan Nasional has discretionary authority to respond to the phenomenon in the community.

**Keywords** : Principle of Equality, Land Reclamation, Discretion